

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi telah memberikan indikasi permasalahan yang serius di perkotaan, seperti; adanya pertumbuhan kawasan permukiman kumuh. Permukiman kumuh yaitu permukiman yang padat, kualitas konstruksi rendah, prasarana, dan pelayanan minim adalah pengentasan kemiskinan (Tjuk Kuswartojo, 2005). Kawasan permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, ciri-cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Budiharjo, 1997)

Pada dasarnya kemunculan kawasan permukiman kumuh diakibatkan karena adanya daya tarik daerah perkotaan yang memiliki tingkat pelayanan fasilitas kota yang tinggi, banyaknya lowongan pekerjaan dan kemudahan jangkauan. Daya tarik tersebut semakin diperkuat oleh adanya pengaruh dari wilayah desa (*non urban*) yaitu rendahnya fasilitas tingkat pelayanan, sempitnya lapangan pekerjaan, sulitnya pengembangan perekonomian dan makin berkurangnya lahan produktif. Kedua faktor tersebut mempengaruhi keinginan penduduk desa untuk berpindah ke kota yang menyebabkan timbulnya berbagai macam masalah, yang berawal dari rendahnya pengetahuan, keterampilan, modal dan kesadaran yang mereka miliki. Kondisi ini mendorong timbulnya kawasan permukiman di daerah perkotaan.(Erwin; Firmansyah, 2016)

Melalui RPJMN 2015-2019 Pemerintah Indonesia telah menetapkan target yang dinamai dengan “Gerakan 100-0-100”. Yakni, pencapaian akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat Indonesia di tahun 2019 dikarenakan kawasan bebas kumuh serta layak huni masih sebatas impian bagi penduduk di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cilegon pada tahun 2019, peningkatan jumlah penduduk di setiap tahunnya dari tahun 2015 ke tahun 2019 mencapai

1,37% dan jumlah penduduk di Kota Cilegon berjumlah 437.205 jiwa tahun 2019. Pesatnya pertumbuhan penduduk ini dipacu oleh pesatnya pertumbuhan Kota Cilegon akibat peningkatan kegiatan industri, perdagangan dan jasa, sebagai implikasi dari lokasi strategis yang dimiliki oleh Kota Cilegon yang termasuk kawasan industri strategis dan sebagai penghubung ibukota DKI Jakarta dan Pulau Sumatera.

Salah satu kasus permukiman kumuh yang terjadi di kawasan perkotaan Kota Cilegon berada di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak. Kelurahan Mekarsari terletak disebelah Selatan Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon dengan Luas Wilayah \pm 472.99 Ha, dengan ketinggian 2 M dari permukaan laut. Berdasarkan surat keterangan "SK Nomor: 600/Kep.314-DPU/2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh Dalam Rangka Pelaksanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Tahun 2016-2020" Kelurahan Mekarsari merupakan salah satu titik kawasan permukiman kumuh yang berada di Kota Cilegon. Kelurahan Mekarsari memiliki potensi terindikasi terdapat kawasan kumuh, berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh tim penyusun Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Cilegon, di Kelurahan Mekarsari terdapat 5 titik untuk sebaran lokasi kawasan kumuh tepatnya di sekitar Lingkungan Lagon Sari RT 07 / RW 04, Lingkungan Tembulun RT 01 dan RT 02 / RW 03, Lingkungan Sukajadi RT 06 / RW 02, Lingkungan Gunung Batur RT 01 dan RT 02 / RW 03, dan Lingkungan Medaksa RT 01 dan RT 02 / RW 01. Hal ini disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan penduduk yang umumnya berasal dari urbanisasi yang menjadikan kondisi permukiman yang semakin padat (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon, 2019).

Lingkungan Medaksa RT 01 dan RT 02 / RW 01, Kelurahan Mekarsari termasuk dalam kawasan permukiman kumuh yang tertera pada surat keterangan (SK Kumuh) Nomor : 600/Kep.314-DPU/2016. Menjelaskan penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh di Kota Cilegon, Lingkungan Medaksa RT 01 dan RT 02 / RW 01 dengan luas wilayah 5,61 Ha dan tingkat kekumuhannya kumuh sedang. Faktor-faktor atau permasalahan Permukiman Kumuh di Lingkungan Medaksa RT 01 dan RT 02 / RW 01 adalah permasalahan sarana dan prasarana lingkungan

seperti hunian yang kondisi rumah tidak sehat, baik pencahayaan maupun udara, dan MCK umum tidak dipelihara dengan baik, hal ini sangat rentan terhadap kebakaran dan permasalahan kurangnya ketersediaan prasarana lingkungan di lingkungan tersebut seperti air bersih, sanitasi, jalan lingkungan dan drainase di kawasan ini kondisinya masih minim dan kurang baik, yang menyebabkan lingkungan permukiman tampak kotor.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan penanganan permasalahan lingkungan salah satunya adalah penanganan permukiman kumuh ini, sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk (1) Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan manusia; (2) Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman serasi dan teratur.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas selanjutnya perlu dilakukan perumusan masalah lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh di Lingkungan Medaksa RT 01 dan RT 02 / RW 01, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi permukiman kumuh di Lingkungan Medaksa, Kota Cilegon?
2. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kekumuhan di Lingkungan Medaksa, Kota Cilegon ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi permukiman kumuh di Lingkungan Medaksa, Kota Cilegon;
2. Menganalisis faktor-faktor yang paling mempengaruhi tingkat kekumuhan di Lingkungan Medaksa, Kota Cilegon.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teori diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota sebagai pemecah permasalahan administrasi khususnya mengenai penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh dan pola penanganannya yang dapat digunakan sebagai dasar atau referensi dalam melakukan penelitian sejenisnya / selanjutnya di bidang perencanaan wilayah dan kota.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam melakukan proses perencanaan dan pengembangan di Kota Cilegon serta mencegah adanya penurunan kualitas kawasan agar tidak muncul permukiman kumuh lagi.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan kumuh yang ada di kawasan kumuh di Lingkungan Medaksa untuk memberikan kesejahteraan masyarakat yang dan mencegahnya agar tidak kumuh lagi.
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini bermanfaat bagi bentuk pengaplikasian dari ilmu yang diperoleh selama diperkuliahan dan menjadi pengalaman yang bermanfaat dan berharga selama melakukan proses dari awal hingga akhir serta menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah bagi peneliti mengenai topik yang diangkat dalam penelitian ini.
4. Bagi peneliti lain hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk dikembangkan lebih lanjut mengenai kajian penanganan kumuh dipermukiman.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

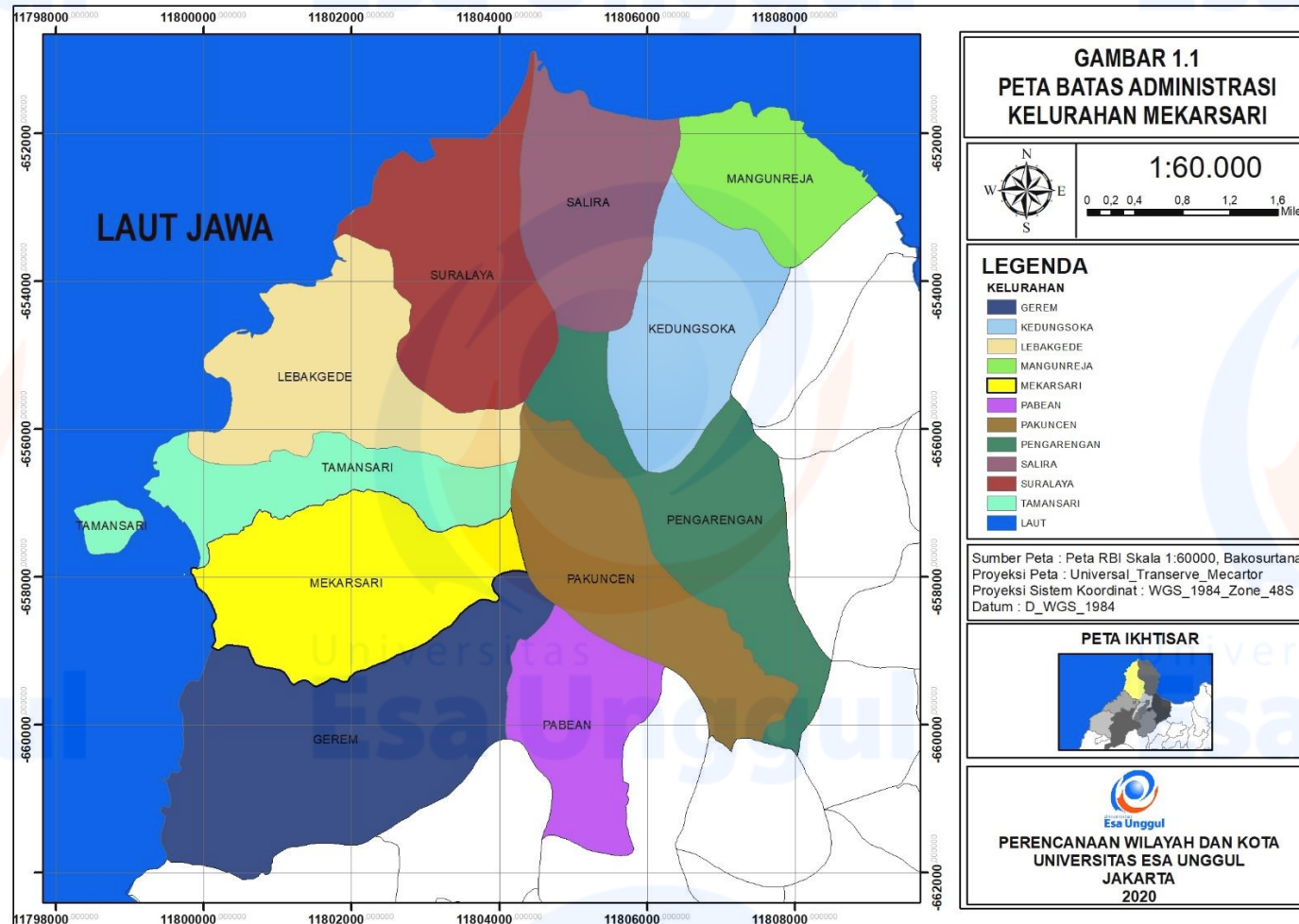
Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri dari ruang lingkup wilayah yang menjelaskan batasan wilayah yang akan menjadi obyek studi dan ruang lingkup substansi yang menjelaskan batasan materi yang akan di analisis dalam studi ini.

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah studi pada penelitian ini berada di Lingkungan Medaksa, Kelurahan Mekarsari, Kota Cilegon dengan luas 5,61 Ha. Secara geografis Lingkungan Medaksa merupakan dataran rendah yang berdekatan dengan daerah pesisir pantai dan Pelabuhan Merak. Adapun batas-batas administrasi dari wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

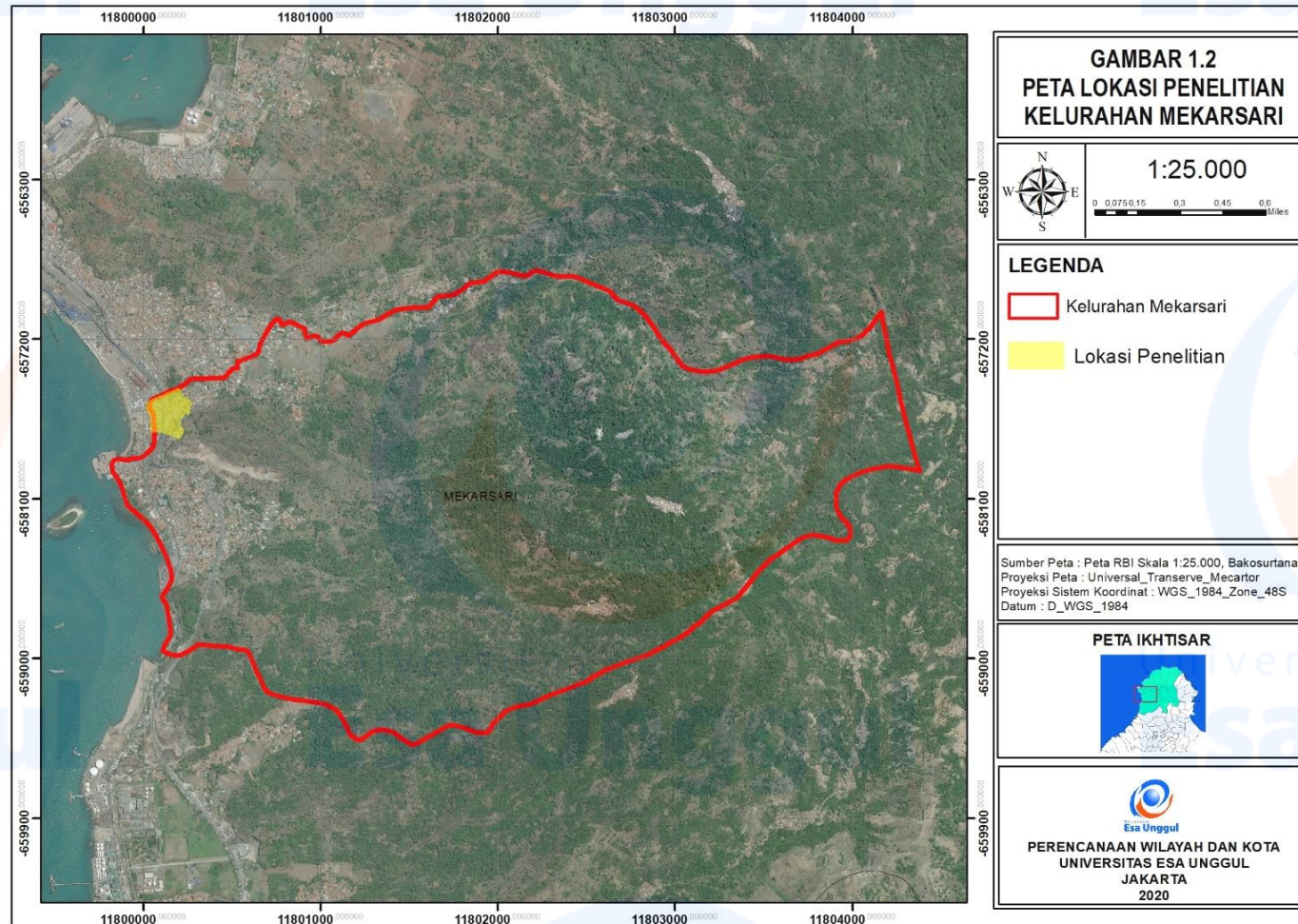
- Sebelah Utara : Lingkungan Kelurahan Tamansari
- Sebelah Selatan : Lingkungan Kelurahan Gerem
- Sebelah Timur : Lingkungan Kelurahan Pekuncen
- Sebelah Barat : Laut Jawa

Gambar 1.1
Peta Batas Administrasi Kelurahan Mekarsari



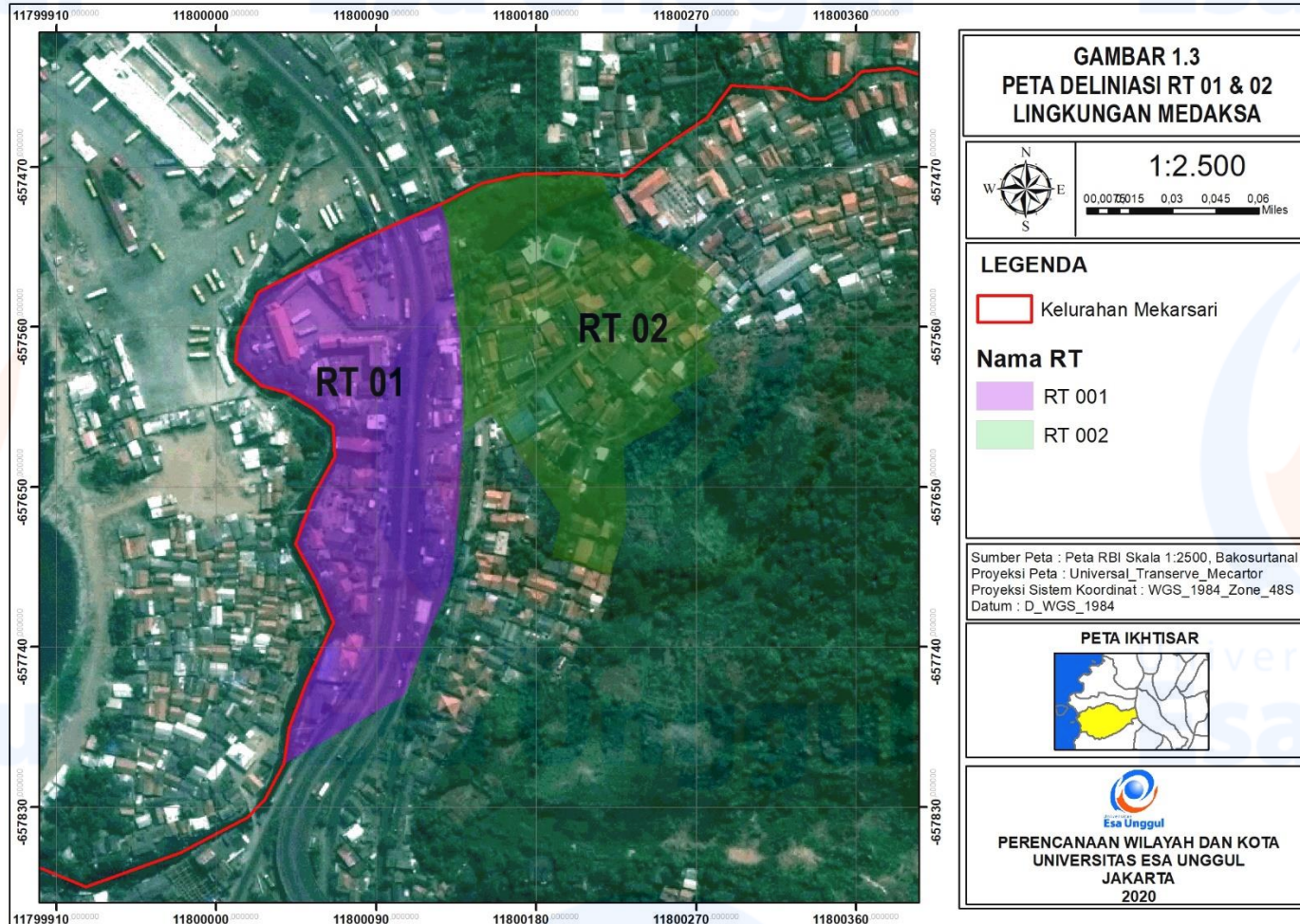
Sumber : Hasil Digitasi, Tahun 2020

Gambar 1.2
Peta Lokasi Studi Kelurahan Mekarsari



Sumber : Hasil Digitasi, 2020

Gambar 1.3
Peta Deliniasi RT 01 dan RT 02 Lingkungan Medaksa



Sumber : Hasil Digitasi, 2020

1.5.2 Ruang Lingkup Materi dan Substansi

Lingkungan Medaksa RT 01 dan RT 02, RW / 01 berada di Kelurahan Mekarsari, Lingkungan Medaksa RT 01 dan RT 02, RW / 01 termasuk kedalam kriteria kumuh sedang berdasarkan surat keterangan (SK Kumuh) No.02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2016. Kondisi fisik di Lingkungan Medaksa menjadi prioritas pemerintah daerah untuk mengurangi kawasan kumuh yang ada di Kelurahan Mekarsari.

Oleh karena itu dalam penelitian ini dibatasi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh dengan memfokuskan pada aspek yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2016 sebagai berikut:

1) Bangunan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan terdiri dari:

- a. Ketidakteraturan bangunan;
- b. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan
- c. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat

2) Jalan lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan terdiri dari :

- a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan
- b. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

3) Penyediaan air minum

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum terdiri dari :

- a. Ketersediaan akses aman air minum; dan
- b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.

4) Drainase lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan terdiri dari :

- a. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
 - b. Ketidakterediaan drainase;
 - c. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
 - d. Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan
 - e. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- 5) Pengolahan air limbah
- Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengolahan air limbah terdiri dari :
- a. Sistem pengolahan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan
 - b. Sarana dan Prasarana pengolahan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- 6) Pengelolaan persampahan
- Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan terdiri dari:
- a. Sarana dan Prasarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
 - b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan
 - c. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah, maupun jaringan drainase.
- 7) Proteksi kebakaran
- Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran terdiri dari:
- a. Ketidakterediaannya prasarana proteksi kebakaran; dan
 - b. Ketidakterediaannya sarana proteksi kebakaran.